

## ANALISIS TERPILIHNYA PERDANA MENTERI ANTHONY ALBANESE (PARTAI BURUH) DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA TAHUN 2022

**Anna Yulia Hartati**

*Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang*

*Email: [annayulia@unwahas.ac.id](mailto:annayulia@unwahas.ac.id)*

### **Abstrak**

*Kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Australia pada bulan Mei tahun 2022 membawa perubahan, atau setidaknya penyesuaian pada kebijakan luar negeri Australia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan kemenangan Partai Buruh pimpinan Anthony Albanese dalam pemilu Australia dan kebijakan luar negerinya. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian deskriptif kualitatif dengan studi dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa ada bukti PM Albanese bersikap dalam isu perluasan pengaruh China di kawasan, penanganan perubahan iklim, dan hubungan Australia dengan Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah pertama pemerintahan PM Albanese, menilai kebijakan China dan perannya yang asertif di kawasan Pasifik Selatan sebagai ancaman. Kedua, Isu perubahan iklim, akan memperkuat komitmennya dalam penanganan perubahan iklim yang selama ini disikapi secara lamban oleh pemerintahan Australia sebelumnya. Ketiga, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan Australia dengan negara-negara tetangganya di kawasan, PM Albanese ingin mempererat hubungan negaranya dengan Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Partai Buruh, pemilu Australia tahun 2022, PM Anthony Albanese, Kebijakan Luar Negeri*

### **A. Pendahuluan**

Partai Buruh Australia akan mengambil alih kekuasaan untuk pertama kalinya sejak 2013, setelah para pemilih meninggalkan pemerintahan konservatif Perdana Menteri (PM) Scott Morrison. Pergeseran ini kemungkinan akan membawa tindakan yang lebih besar terhadap isu China, perubahan iklim dan hubungan bilateral dengan Indonesia. Anthony Albanese menjadi Perdana Menteri (PM) Australia terpilih setelah Partai Buruh yang dipimpinnya meraup suara mayoritas dalam pemilihan nasional pada hari Sabtu, 21 Mei 2022. Hasil pemilu ini menjadi sejarah baru bagi politik Australia dalam satu dekade terakhir setelah sebelumnya pemerintahan Australia dipimpin oleh Koalisi Partai Liberal pimpinan Scott Morrison. Morrison sudah menduduki kursi perdana menteri sejak 2018.

Partai Buruh memperoleh suara mayoritas dalam pemilu Australia kali ini berkat dukungan dari Partai Hijau dan kelompok independen yang mengampanyekan kebijakan

tentang kesetaraan gender dan penanganan perubahan iklim. Kampanye tersebut berhasil meraih simpati dan melenyapkan amarah pemilih atas kelambanan pemerintahan Morrison menangani perubahan iklim (cnnindonesia.com., 21 Mei 2022). Kemenangan Partai Buruh pimpinan Albanese diberitakan sejumlah media akan membawa perubahan bagi kebijakan luar negeri Australia, atau setidaknya penyesuaian dan penekanan pada isu-isu tertentu. Analisis memperkirakan, pemerintahan baru pimpinan PM Albanese akan fokus pada usaha diplomatik di Asia Tenggara serta menggiatkan koalisi untuk melawan kegiatan China di sana, selain juga *concern* dengan isu perubahan iklim (Kompas, 23 Mei 2022).

Kemenangan Partai Buruh pimpinan Albanese dalam pemilu Australia menarik untuk dicermati dan dianalisis, terutama kebijakan luar negerinya, seperti dalam menyikapi perluasan pengaruh China, penanganan perubahan iklim, dan hubungan Australia dengan Indonesia. Hal tersebut coba dianalisis dan menjadi permasalahan yang dibahas dalam kajian singkat ini.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisa kemenangan partai buruh dalam pemilu tahun 2022 dan upaya membuktikan kebijakan luar negeri yang dibangun oleh PM terpilih Albanese. Data-data diperoleh melalui dokumen, artikel – artikel, buku, buku dan sumber sumber relevan dengan penelitian ini.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Mengkhawatirkan Perluasan Pengaruh China**

Kepulauan Pasifik merupakan bagian dari diplomasi strategis China secara global. Kehadiran China di Kepulauan Pasifik membawa potensi signifikan bagi negara di Kepulauan Pasifik (Pacific Island Countries). Meskipun demikian, kemunculan China ini tidak selalu dapat dipandang secara positif oleh berbagai pihak. Ada sejumlah tantangan yang menjadi akibat dari kemunculan China dengan meningkatnya relasi bersama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Kehadiran China di Kepulauan Pasifik merupakan usaha untuk memenuhi kepentingan China. Meski negara-negara di Kepulauan Pasifik bukan merupakan negara maju melainkan negara berkembang, China tetap memandang penting untuk membangun konektivitas dengan wilayah ini. Hal ini secara implisit

menunjukkan adanya intensi China untuk memenuhi kepentingannya, baik dalam hubungannya dengan regional ini maupun secara global. Kepulauan Pasifik memegang peranan signifikan dan menjadi cerminan dari intensi China untuk semakin banyak terlibat dan berpengaruh dalam politik internasional. Langkah China untuk meningkatkan kehadirannya di Kepulauan Pasifik merupakan suatu proses sangat berani. Dalam perannya di Kepulauan Pasifik, China harus berhadapan dengan kekuatan yang telah lebih dahulu ada dan memiliki peranan penting di wilayah tersebut, seperti Australia dan Selandia Baru. Wilayah Kepulauan Pasifik sendiri dikenal dengan terminologi “Western Lake” atau “American Lake”, sebagai suatu pengistilahan, menggambarkan dominasi negara Barat dan Amerika Serikat (AS) di wilayah tersebut<sup>1</sup>. Selain itu, kebangkitan China dipandang sebagai upaya untuk mengganti status quo dari AS sebagai negara paling berpengaruh di dunia.

Pemerintahan Anthony Albanese yang berhaluan tengah kiri menghadapi berbagai tantangan kebijakan luar negeri, termasuk dalam hubungan Australia dengan China yang disebutkan menyulitkan. Hubungan Australia - China memang merenggang selama beberapa tahun terakhir akibat berbagai pertikaian geopolitik. Langkah Beijing yang menandatangani Pakta Keamanan dengan Kepulauan Solomon, misalnya, telah meningkatkan kekhawatiran terhadap perluasan pengaruh China yang semakin besar di kawasan Pasifik Selatan, yang selama ini dianggap Australia secara tradisional berada di bawah kekuasaan mereka. Canberra khawatir Pakta Keamanan tersebut, yang rinciannya belum diumumkan, bisa menjadi langkah menuju kehadiran militer China yang berjarak kurang dari 2.000 km dari Australia dan menjadi pijakan awal untuk kehadiran militer China di Pasifik Selatan (Kompas, 22 Mei 2022).

Pada 22 November 2014, Presiden People Republic of China, Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Fiji. Tujuan kunjungannya adalah pertemuan bersama dengan delapan pemimpin negara di Kepulauan Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik dengan China diantaranya adalah Fiji, Papua Nugini, Tonga, Samoa, Vanuatu, Mikronesia, Kepulauan Cook and Niue. Perkunjungan ini sekaligus menandakan meningkatnya komitmen China untuk hadir dan terlibat dalam urusan di kawasan Kepulauan Pasifik.

Dalam beberapa dekade terakhir, China secara aktif terlibat dalam hubungan diplomatik dan politik, menjadi penyedia bantuan serta meningkatkan perdagangan, investasi dan hubungan ekonomi dengan Kepulauan Pasifik. Sebelum menguraikan peran

dan kontribusi China bagi kawasan Kepulauan Pasifik, perlu untuk mengetahui lebih dahulu tujuan China yang ingin dicapai melalui keterlibatannya dalam kawasan.

Pertama, sebagaimana diketahui bahwa China, People Republic of China (PRC), memiliki One China Policy sebagai suatu upaya untuk membendung, melemahkan dan menjatuhkan peran Republic of China atau Taiwan dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Sebagaimana diketahui, Taiwan saat ini merupakan bagian dari China, bukan negara berdaulat penuh, dan hanya diakui oleh 15 negara sejak pemerintahan Presiden Tsai Ing Wen.

Keterlibatan China, tidak bisa dibantah, bertujuan untuk membatasi peran Taiwan dalam dunia internasional. Kebijakan China dalam rangka menggalang dukungan dari negara-negara di Kepulauan Pasifik untuk mengisolasi Taiwan. Hal ini mengingat bahwa Taiwan cukup berpengaruh di kawasan, dibuktikan dengan adanya sejumlah negara yang mengakui keberadaan Taiwan dan memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, seperti Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, dan Tuvalu. (Chin Lin, K., & Gertner, A. V., 2015)

Kedua, di satu sisi, China dipandang meningkatkan kekuatan hegemon potensial. China dicurigai sedang berupaya untuk mendominasi kawasan Kepulauan Pasifik berhadapan dengan AS, Australia dan sekutunya sebagai kekuatan yang telah mendominasi kawasan tersebut sejak lama. Meskipun demikian, di sisi lain, China dipandang memiliki kepentingan regional terbatas dan umumnya hanya kepentingan ekonomi dan perdagangan. Kepentingan China atas kawasan Kepulauan Pasifik sangat beragam dan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan serta adanya dinamika dalam dunia internasional. Para akademisi justru melihat bahwa kepentingan China yang beragam tidak berarti telah dipikirkan dengan matang dan terkoordinir secara baik.

Ketiga, ekonomi menjadi faktor penyebab yang mendorong China untuk terlibat di panggung global. Pada tahun 2020, sekitar 60% penyedia kebutuhan minyak untuk China berasal dari luar negeri. Kebutuhan akan adanya penyedia bahan mentah (*raw materials*), dibutuhkan China untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya menjadi satu hal sangat penting. Kebijakan perdagangan China memprioritaskan penyediaan minyak dan gas alam untuk memenuhi kebutuhannya. Merujuk pada alasan ekonomi, melatarbelakangi keterlibatan China di panggung global, China turut melihat Kepulauan Pasifik sebagai suatu kawasan potensial untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, kebijakan China terhadap Papua Nugini (PNG). China berusaha membangun kerja sama dengan PNG dengan menjadikan PNG sebagai penyedia kebutuhan gas alam bagi China. Selain itu, China

menjadikan PNG dan Kepulauan Solomon sebagai penyedia kebutuhan kayu dan ikan. China memandang Kepulauan Pasifik sebagai penyedia kebutuhan energi dan mineral yang luas. Ketiga tujuan dari keterlibatan China di kawasan Kepulauan Pasifik tersebut merupakan suatu landasan cukup untuk menguraikan peran dan kontribusi

Kekhawatiran Australia terhadap China dapat dipahami jika menyaksikan upaya yang dilakukan China dalam beberapa tahun terakhir yang terus memperkuat pengaruhnya di seluruh dunia, tidak terkecuali di kawasan Pasifik Selatan yang secara tradisional menjadi wilayah pengaruh Australia. Perhatian China ke Pasifik Selatan tidak dapat dipungkiri memang semakin meningkat dan intensif. (Changsen, YU, 2014). Hal itu ditandai dengan meningkatnya bantuan ekonomi China kepada negara - negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. China, yang tercatat sebagai pendonor peringkat ketiga setelah Australia dan AS, kerap menawarkan paket bantuan keuangan yang bertujuan untuk memperkuat perdagangan, membangun infrastruktur, meningkatkan kemampuan pemerintah dan militer, serta mengembangkan sumber daya alam. (D'Arcy, Paul., 2007).

Diplomasi China tersebut disambut baik oleh para pemimpin negara-negara Pasifik Selatan, namun tidak bagi Australia (Aulia, 2022). Australia, tidak terkecuali pemerintahan PM Albanese, menilai perkembangan China yang luar biasa dan perannya yang lebih asertif menyebabkan negara ini dianggap sebagai ancaman keamanan di Pasifik Selatan. Kehadiran China di Pasifik Selatan bagi Australia adalah cermin dari hasrat China yang ingin menambah superioritasnya ke tingkat global. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan oleh Australia yang selama ini memiliki kedekatan hubungan yang kuat dengan negara-negara Pasifik Selatan, dan oleh karenanya kehadiran China di kawasan ini perlu disikapi secara kritis.

Australia, yang selama ini juga kerap mengkritisi kebijakan keamanan China di Laut China Selatan, menilai langkah China yang asertif di Pasifik Selatan perlu direspons melalui pendekatan pertahanan dan keamanan, termasuk dengan melibatkan Amerika Serikat (AS), yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan tidak membiarkan China tampil dominan di kawasan ini.

## **2. Penanganan Perubahan Iklim**

Rakyat Australia menginginkan kebijakan dan praktik nyata untuk mitigasi perubahan iklim. Mereka sudah muak dengan berbagai fenomena cuaca ekstrem yang merugikan secara ekonomi, keamanan, dan psikologis. Dua hari menjelang pemilihan umum federal di Australia, masyarakat kian keras menggaungkan agar para kandidat menyiapkan

kebijakan tegas terkait penanganan krisis iklim. Secara global, Australia menyumbang 1 persen emisi karena jumlah penduduk yang relatif kecil. Akan tetapi, negara ini mengalami dampak perubahan iklim yang terasa langsung oleh warga.

Isu penanganan krisis iklim bagi sejumlah negara mungkin terkesan elitis dan teoretis. Di Australia, kerugian akibat cuaca ekstrem seperti kemarau, banjir, dan kebakaran hutan benar-benar merugikan rakyat. Laporan Dewan Iklim Australia (CC) mencatat, sejak tahun 2018, ada 500 orang tewas akibat dampak cuaca ekstrem. Oleh sebab itu, pada pemilu federal Sabtu (21/5/2022), dua pertiga dari 17 warga yang dinyatakan layak memberikan suara meminta adanya perubahan berarti dari segi peralihan ke energi hijau. Sebagai gambaran, curah hujan yang turun selama tiga hari di Brisbane saat itu setara dengan 70 persen hujan selama satu tahun. Peristiwa itu merupakan banjir terburuk yang dialami Australia secara umum. Ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal karena rumah-rumah mereka dinyatakan tidak layak huni dan wilayah permukiman tersebut dinilai terlalu berbahaya untuk ditempati. Isu lingkungan di Australia sangat berkaitan dengan ekonomi. Masyarakat terpaksa menempati cekungan dan dataran rendah karena mereka tidak mampu membeli ataupun mengontrak tempat tinggal di wilayah-wilayah yang ideal. Akibatnya, kian banyak orang terpapar risiko bencana alam.

Di tengah kepeninganan massal ini, Perdana Menteri Australia Scott Morrison dari Partai Liberal bersama koalisinya, Partai Nasional, terkesan santai. Menurut Morrison, upah masyarakat meningkat pada periode 2021-2022 sebanyak 3,1 persen. Apalagi, pandemi Covid-19 dinilai sudah ditangani dengan baik sehingga masyarakat bisa kembali bekerja secara normal dan inflasi akan tertangani dengan sendirinya. Data pusat statistik negara tersebut menyatakan angka pengangguran sebesar 3,9 persen atau terendah sejak tahun 1974.

Morrison dalam kampanyenya menjanjikan menurunkan emisi Australia 26 persen hingga 28 persen pada tahun 2030. Negara ini merupakan pengekspor batubara nomor dua terbesar di dunia. Dari sisi cadangan batubara, Australia nomor satu. "Pasti pemerintah akan mengembangkan teknologi hijau, terutama di sektor pemakaian energi hidrogen dan penangkapan karbon. Pesaing Morrison, Anthony Albanese dari Partai Buruh, menjanjikan perubahan sumber energi dari bahan bakar fosil ke sinar matahari. Ia merencanakan pemasangan panel-panel surya secara nasional yang diikuti dengan peremajaan jaringan listrik agar lebih hemat dan ramah lingkungan. Di sektor industri, Albanese menginginkan peningkatan pemakaian kendaraan listrik yang dijual dengan harga terjangkau oleh

masyarakat serta penggantian sistem industri penambangan, transportasi, dan konsumsi dengan cara yang mengurangi jejak karbon.

Pemerintahan baru di bawah Partai Buruh tampak bertolak belakang dengan administrasi Morrison yang masa bodoh terhadap krisis iklim dan lingkungan. Mereka berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 43 persen pada 2030, meningkatkan pangsa energi terbarukan untuk listrik dari 31 persen jadi 82 persen dalam satu dekade, sampai berinvestasi sebesar 1,2 miliar dolar untuk melestarikan Great Barrier Reef dan menjaga 64 ribu lapangan kerja yang bergantung dari sana.

Perubahan iklim juga menjadi isu yang diangkat oleh pemerintahan Partai Buruh pimpinan PM Albanese dan juga menjadi bagian yang dipromosikan dalam kebijakan luar negeri Australia. Hal tersebut tidak terlepas dari kekecewaan warga Australia yang menilai pemerintahan Australia sebelumnya di bawah PM Morrison, lamban dalam menangani krisis iklim. Kekecewaan warga Australia tersebut sudah terlihat pada saat kampanye pemilu, yang meminta para kandidat dari partai yang bertarung untuk menyiapkan kebijakan tegas terkait penanganan krisis iklim.

Secara global, Australia menyumbang 1 persen emisi karena jumlah penduduk yang relatif kecil. Akan tetapi, negara ini mengalami dampak perubahan iklim yang terasa langsung oleh warga. Kebakaran hutan hebat yang dijuluki *Black Summer* atau Musim Panas Hitam pada tahun 2019/2020 adalah kebakaran yang tercatat paling intens di Australia, dan dianggap sebagai dampak dari perubahan iklim (voaindonesia.com., 13 Mei 2022). Gelombang panas sejauh ini merupakan bahaya alam yang paling mematikan dan kondisi itu sangat mungkin terjadi di Australia. Australia merupakan negara benua berpenghuni terkering di dunia, di mana musim kemarau dapat berlangsung bertahun-tahun. Laporan baru yang dikeluarkan Dewan Iklim, sebuah organisasi nirlaba independen, menyatakan kerugian akibat cuaca ekstrem Australia telah meningkat hampir dua kali lipat sejak tahun 1970-an. Laporan ini memperingatkan dampak finansial kebakaran, banjir, kemarau, badai dan naiknya ketinggian permukaan air laut yang terkait dengan perubahan iklim dapat melambung tinggi, berpotensi merugikan ekonomi negara hingga 76 miliar dollar AS setiap tahun pada tahun 2038 (voaindonesia.com., 13 Mei 2022).

Oleh karena itu, pemerintahan baru Australia di bawah PM Albanese berkepentingan melakukan perubahan fundamental untuk menangani perubahan iklim dan merencanakan pembangunan baru. Tanpa tindakan yang lebih kuat, mustahil bagi Australia untuk bertindak

secara konsisten sejalan dengan Perjanjian Iklim Paris, suatu perjanjian internasional mengenai perubahan iklim yang mengikat secara hukum.

### **3. Hubungan Australia-Indonesia**

Australia-Indonesia adalah dua tetangga yang hubungan bilateralnya jauh dari potensi dan fakta geografisnya. Gesekan yang sudah dan akan selalu ada, jadi tantangan. Namun sejumlah capaian bisa jadi modal positif. Menteri Menteri baru Australia, Anthony Albanese, telah menegaskan keinginannya untuk memperkuat hubungan Australia dengan Indonesia. Niat itu disampaikan tiga hari sebelum partainya, Partai Buruh, memenangi pemilu parlemen yang mengantarnya menjadi pemimpin Australia, Sabtu (21/5/2022). Albanese berjanji untuk menempatkan Indonesia sebagai prioritas dalam kunjungan diplomatik pertamanya setelah terpilih menjadi PM Australia.

Menurut *The Australian* dan *Bloomberg* saat itu, Australia ingin membangun hubungan yang lebih kuat dan erat dengan Indonesia, negara yang disebut Albanese sebagai “negara raksasa” atau “negara adikuasa” di masa depan. Dia menilai penting bagi Australia memperkuat kemitraan ekonomi, mengingat ekonomi dan pasar Indonesia yang besar dan terus bertumbuh. Realitas hubungan Indonesia-Australia saat ini pada dasarnya sangat baik, walau pernah menghadapi beberapa tantangan sehingga menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Pengamat menilai, hubungan kedua negara pada saat ini sedang berada dalam “posisi yang baik dan intens”. Hal ini terlihat dengan adanya kesepakatan atau perjanjian di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Di bidang ekonomi dan perdagangan, ada Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang diteken pada Maret 2019. Kedua negara juga memiliki kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA), termasuk Lombok Treaty pada 2006 dan Joint Understanding on Security pada 2014. Hubungan Indonesia-Australia terbagi dalam tiga kategori, yakni politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, serta sosial dan budaya. Bahkan, hubungan untuk kategori kedua dan ketiga berkembang baik pada level bilateral maupun multilateral.

Kerja sama Australia-Indonesia pada sektor ekonomi dan perdagangan bahkan semakin aktif belakangan. Tantangannya, Indonesia selalu mengalami defisit dan Australia surplus. Setidaknya merujuk data Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia konsisten defisit selama tiga tahun terakhir. Pada Januari-Juli 2021,



misalnya, neraca perdagangan Indonesia dengan Australia mengalami defisit 3,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Angka ini naik 45,2 persen dibanding periode yang sama pada 2020 yang mencatat defisit 2,1 miliar dollar AS. Pada Agustus, defisit mencapai 6,2 miliar dollar AS akibat banyaknya impor bahan baku dan bahan penolong.

Ketua Pusat Studi Australia Universitas Nasional (CFAS), Harry Darmawan mengatakan, kemenangan Albanese dari Partai Buruh akan membawa optimisme buat Indonesia, mulai dari hubungannya dengan Australia hingga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Analisis itu, kata Harry tidak luput dipengaruhi oleh faktor sejarah, yaitu hubungan mesra kedua negara ketika Australia dipimpin Partai Buruh, yang dimulai saat Australia mendukung kemerdekaan Indonesia ([mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)., 23 Mei 2022).

Faktor lainnya adalah letak geografi Indonesia yang strategis bagi Australia dan negara terbesar di kawasan. Stabilitas politik antara Indonesia dan Australia adalah jaminan bagi stabilitas Australia dan kawasan. Ini artinya, Albanese dapat diajak berbicara untuk membahas isu keamanan yang menjadi kepentingan kedua negara, seperti halnya yang tertuang dalam Lombok Treaty. (Mackie, Jamie, 2007). Sebagaimana diketahui, Lombok Treaty merupakan perjanjian antara Indonesia dan Australia yang menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional. Perjanjian ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mendorong dialog bilateral, pertukaran, dan pelaksanaan kegiatan secara kooperatif. Perjanjian ini memperkuat komitmen untuk bekerja sama dalam pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, keamanan maritim, serta manajemen dan tanggap darurat. Komitmen Partai Buruh Australia untuk memperkuat kerja sama dengan negara - negara Asia Tenggara, terutama dengan Indonesia, dibuktikan dengan kunjungan kenegaraan PM Albanese ke Indonesia dan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Senin 6 Juni 2022 di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam kunjungan kenegaraan PM Albanese ke Indonesia, semangat untuk memastikan stabilitas dan perdamaian di kawasan muncul. Hal itu tampak dalam jumpa pers PM Albanese bersama Presiden Jokowi usai pertemuan. Kedua pemimpin sama-sama mengutamakan stabilitas dan perdamaian kawasan (Kompas, 7 Juni 2022). Oleh karena itu, kompetisi China melawan AS bersama sekutu harus dikelola dengan baik agar tidak pecah menjadi konflik terbuka di kawasan Indo-Pasifik. Kerja sama Australia-Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi juga menjadi perhatian Albanese (Republika, 7 Juni 2022).

Dalam kunjungannya di Indonesia, Albanese menyampaikan keinginannya untuk memanfaatkan sebaik mungkin Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Australia-Indonesia (IA-CEPA). Melalui perjanjian ini, tersedia koridor atau sarana bagi relasi ekonomi yang luas. Kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua pihak merupakan salah satu wujud konkret dari relasi dua negara. Kemajuan dan kemakmuran yang dicapai melalui kerja sama ekonomi membuat persahabatan antarnegara kian erat. Kedua pihak sama-sama merasa saling membutuhkan, sekaligus melihat harus saling memberi agar hubungan langgeng.

Jika Albanese kini menempatkan Indonesia sebagai prioritas kebijakan luar negeri Australia, itu bukanlah hal baru. Sesungguhnya hampir semua pemerintahan, baik Partai Buruh maupun Partai Liberal, dalam 3-4 dekade terakhir menempatkan Indonesia sebagai negara penting bagi Australia. Hal itu juga telah ditunjukkan Morrison.

Memang benar, Partai Buruh banyak meninggalkan warisan positif dalam hubungan Australia-Indonesia. Dimulai ketika kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Serikat Buruh, organisasi binaan Partai Buruh, memberi dukungan. Australia juga menjadi wakil resmi Indonesia dalam Komisi Tiga Negara, yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia pada era itu. Australia di bawah PM Bob Hawke (1983-1991) dan PM Paul Keating (1991-1996) sangat dekat dengan Presiden Soeharto. Bahkan Soeharto disapa sebagai *uncle*, sapaan hubungan harmonis antara Indonesia-Australia. Kedekatan ini terulang pada masa PM Kevin Rudd (2007-2010, Juni-September 2013) dan PM Julia Gillard (2010-Juni 2013) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia bahkan dimasukkan dalam 'Buku Putih' mereka (Rudd dan Gillard), sebagai negara yang akan maju dan menjadi sahabat terdekat Australia.

Australia tampaknya semakin sadar betapa pentingnya Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya dalam kerangka membendung pengaruh/hegemoni China di kawasan yang dianggap ancaman bagi kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan Australia. Australia membutuhkan peran Indonesia dalam Indo-Pasifik, menerima dan memahami pembangunan kekuatan militer Australia termasuk kehadiran AUKUS yang baru dibentuk dengan Inggris dan AS.

Indonesia juga dilihat sebagai "pintu" masuk bagi Australia untuk bekerja sama lebih erat dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama negara-negara ASEAN. Dapat dikatakan usaha itu serta usaha mewujudkan inisiatif Indo-Pasifik dan pembangunan kekuatan militer kawasan guna membendung perluasan pengaruh China, tidak akan berhasil

tanpa dukungan dan keikutsertaan Indonesia di dalamnya. Australia-Indonesia juga harus mampu menjadi penyeimbang dunia di tengah tarik-menarik pengaruh antara AS dan China. Apabila Australia-Indonesia dapat mengambil peran tersebut, maka interaksi global akan memiliki pilihan obyektif, selain harus ikut dalam kubu AS atau China.

#### **D. Kesimpulan**

Kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Australia pada bulan Mei 2022 lalu membawa perubahan, atau setidaknya penyesuaian penekanan pada kebijakan luar negeri Australia, seperti halnya dalam menyikapi perluasan pengaruh China di kawasan Pasifik Selatan, penanganan perubahan iklim, dan hubungan Australia-Indonesia. Terkait China, Australia menilai asertifitas China di Pasifik Selatan merupakan ancaman dan cermin dari hasrat negara tersebut yang ingin menambah superioritasnya ke tingkat global.

Hal tersebut tidak bisa dibiarkan oleh Australia yang selama ini memiliki kedekatan hubungan yang kuat dengan negara-negara Pasifik Selatan, dan oleh karena itu kehadiran China di kawasan ini perlu disikapi secara kritis. Untuk perubahan iklim, Partai Buruh yang menilai pemerintahan sebelumnya lamban menyikapinya, berpandangan bahwa Australia perlu melakukan perubahan fundamental untuk menangani perubahan iklim sejalan dengan dengan sasaran dalam Perjanjian Iklim Paris. Sementara itu, dalam hubungan Australia-Indonesia, pemerintahan Partai Buruh tampaknya lebih realistis dengan perkembangan

#### **Daftar Pustaka**

- Changsen, YU. (2014), *China's Economic Relations with Pacific Island Countries*, Sun Yatsen University, National Center for Oceania Studies.
- D'Arcy, Paul. (2007), *China in the Pacific: Some Policy Considerations for Australia and New Zealand* dalam *Jurnal State Society and Governance in Melanesia*, The Australian National University.
- Dugis, Vinsensio M.A. (-), *Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik* dalam *Jurnal Global & Strategis*, Th. 9, No. 1, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Chin Lin, K., & Gertner, A. V. (2015). *Maritime Security in the Asia Pacific: China and the Emerging Order in the East and South China Seas*. London: Chatham House
- Evans, Gareth. (1993). *Australia's Foreign Policy in the World of the 1990s*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Gordon, Michael. (1993). *A true believer: Paul Keating*. Brisbane: University of Queensland Press

Mackie, Jamie. (2007). *Australia and Indonesia Relations: Currents Problems, Future Prospects*. New South Wales: Lowy Institute For International Policy

“Albanese Janji Perbaiki Citra Australia”, *Media Indonesia*, 23 Mei 2022

“Albanese Prioritaskan Kawasan”, *Kompas*, 23 Mei 2022

Aulia, Luki. “China Dekati Pasifik, Australia dan Selandia Baru Kelabakan”, *kompas.id.*, 26 Mei 2022, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/05/26/china-dekati-pasifik-australia-dan-selandia-baru-kelabakan>, diakses 1 Juni 2022.

“Australia Peringatkan Dampak Kelambanan Tindakan Terkait Perubahan Iklim”, *voaindonesia.com.*, 13 Mei 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/australia-peringatkan-dampak-kelambanan-tindakan-terkait-perubahan-iklim/5776193.html>, diakses 1 Juni 2022.

“Australia Kritisi Perluasan Pengaruh China”, *Kompas*, 22 Mei 2022

“Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama”, *Republika*, 7 Juni 2022